

BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pernibentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri genealogis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri).
22. Jumlah Negeri/Negeri Administratif adalah jumlah Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.99.717.741.500,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap kepala pemerintah negeri/negeri administratif dan perangkat negeri/negeri administratif; dan
 - Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Indikator yang digunakan untuk pembagian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk masing-masing Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- alokasi dasar;
- alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat negeri/negeri administratif.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dengan jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat setiap Negeri/Negeri Administratif dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- 20 % (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 30 % (tiga puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10 % (sepuluh lima per seratus) untuk luas wilayah;
 - 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis; dan
 - 10 % (sepuluh per seratus) untuk jumlah perangkat negeri.
- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,20 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) + (0,10 * Z5)\} *$$

(ADD Kabupaten Maluku Tengah-ADN Kabupaten Maluku Tengah).

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif setiap yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten Maluku Tengah.
- Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total IKG Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z5 = Rasio Jumlah Perangkat Negeri setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total Jumlah Perangkat Negeri se- Kabupaten Maluku Tengah.
- ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Negeri/Negeri Administratif dikalikan jumlah Negeri/Negeri Administratif dalam Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 7

Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 8

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif untuk setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Pemerintah Negeri telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Negeri sebagai berikut:

- a. Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri);
- b. Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri);
- c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- d. Laporan pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri; dan
- e. Surat Rekomendasi Camat setempat untuk memastikan bahwa Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif masih menjabat dalam jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pada pasal 10 diatas.

BAB V
TAHAPAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang diatur sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III, sebesar 20 % (dua puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif, Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

Pasal 13

- (1) Penyalurán Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap III dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Selain Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b, pasal 11 dan 12 Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib melengkapinya dengan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN/Saniri Negeri dan honor bendahara Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 15

Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif penggunaannya dianggarkan dalam APB Negeri.

BAB VI
PENGGUNAAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dianggarkan dalam APB Negeri yang telah disusun dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, tunjangan dan operasional BPN/Saniri Negeri, insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
 - b. pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja tak terduga.

Pasal 18

- (1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan lainnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk :
 - a. perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Negeri/Negeri Administratif atau fasilitas umum Negeri/Negeri Administratif lainnya yang tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;

- b. penguatan kelembagaan Negeri/Negeri Administratif dan kegiatan Negeri/Negeri Administratif lainnya yang dianggap penting dan tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
- c. mendanai program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hasil Musyawarah Negeri/Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam RKP Negeri dengan Peraturan Negeri.

Pasal 19

- (1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
 - b. operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Operasional Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat tulis kantor (ATK);
 - b. benda pos;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya listrik, air dan telepon;
 - e. cetak dan penggandaan;
 - f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
 - g. makanan dan minuman rapat;
 - h. pakaian dinas dan atributnya;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. musyawarah Negeri/Negeri Administratif;

- k. pendataan Negeri/Negeri Administratif;
 - l. pengelolaan Informasi Negeri/Negeri Administratif;
 - m. tunjangan/Insentif RT/RW;
 - n. operasional BPN/Saniri Negeri;
 - o. pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Tunjangan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Tunjangan BPN/Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c besarnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
- (7) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentrainan dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dan merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Peraturan Bupati Nomor 38.a tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Negeri/Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APB Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pengeluaran Kas Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 22

Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Selain Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif juga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif, tunjangan BPN/Saniri Negeri dan honor bendahara Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan disampakannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pemantauan atas penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif ditemukan adanya keterlambatan atau penundaan pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan BPN/Saniri Negeri selama 1 (satu) triwulan atau lebih maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif atas keterlambatan atau penundaan pembayaran tersebut;
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan;
 - c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif maka Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran, Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif belum dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan dokumen persyaratan umum penyaluran, maka sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut menjadi SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif pada RKUD.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan kembali SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang tidak disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. SILPA Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun berikutnya.

- (5) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

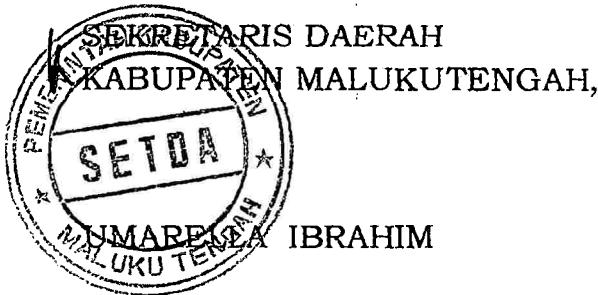
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 FEBRUARI 2017

BUPATI MALUKU TENGAH,



Diundangkan di Masohi
pada tanggal



IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2017 NOMOR 309

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 58 TAHUN 2017

TANGGAL: 16 FEBRUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

No	Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Jumlah Perangkat Negeri					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
KECAMATAN AMAHAI																				
Negeri TAMILUW	428.893.512	6.217	0,018	0,36%	2.289	0,03	0,91%	1.448228	0,0002	0,00%	30.225960	0,0038	0,11%	12	0,058	0,08%	0,014728681	293.742.155	722.635.66	
Negeri SEPA	428.893.512	1.280	0,004	0,08%	764	0,01	0,30%	185.597688	0,0241	0,24%	30.980994	0,0039	0,12%	15	0,010	0,10%	0,008382585	167.178.481	596.071.99	
Negeri RUTAH	428.893.512	2.863	0,008	0,17%	729	0,01	0,29%	74.268127	0,0096	0,10%	30.860789	0,0038	0,12%	9	0,006	0,06%	0,007312765	145.842.479	574.735.99	
Negeri SOAHUKU	428.893.512	4.018	0,012	0,24%	602	0,01	0,24%	50.130986	0,0065	0,06%	28.802138	0,0036	0,11%	8	0,005	0,05%	0,007026374	140.130.833	569.024.34	
Negeri AMAHAI	428.893.512	3.560	0,010	0,21%	493	0,01	0,20%	96.548565	0,0125	0,13%	35.586551	0,0044	0,13%	9	0,006	0,06%	0,007247154	144.533.961	573.427.47	
Negeri HARURU	428.893.512	7.156	0,021	0,42%	1.512	0,02	0,60%	38.433756	0,0050	0,05%	28.485567	0,0035	0,11%	8	0,005	0,05%	0,012326248	245.829.129	674.722.64	
Negeri AME	428.893.51	1.099	0,003	0,06%	100	0,00	0,04%	20.42673	0,0026	0,03%	31.884440	0,0040	0,12%	7	0,005	0,05%	0,002977176	59.375.457	488.268.96	
Negeri KMAKI	428.893.51	3.699	0,011	0,22%	958	0,01	0,38%	72.414442	0,0094	0,09%	28.987983	0,0036	0,14%	10	0,007	0,07%	0,008689412	173.297	709.602.191.22	
Negeri IKA	428.893.51	573	0,002	0,03%	124	0,00	0,05%	7.42681	0,0010	0,01%	42.253798	0,0053	0,16%	8	0,005	0,05%	0,003051231	60.852.373	489.745.88	
Negeri NBA BARU	428.893.51	370	0,001	0,02%	120	0,00	0,05%	15.78797	0,020	0,02%	44.916790	0,0056	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003055305	60.933.631	489.827.14	
Negeri YAINUELO	428.893.512	18	0,006	0,13%	1.636	0,02	0,65%	7.35738	0,010	0,01%	36.810801	0,0046	0,14%	7	0,005	0,05%	0,009722185	193.894	862.622.788.37	
Negeri NUANE	428.893.512	376	0,001	0,02%	214	0,00	0,09%	103.755416	0,013	0,13%	36.532751	0,0045	0,14%	7	0,005	0,05%	0,004042601	59	84.968.679	
Negeri HATUHENU	428.893.512	518	0,002	0,03%	310	0,00	0,12%	0,249013	0,0000	0,00%	44.061684	0,0055	0,16%	7	0,005	0,05%	0,003665282	73.098.729	501.992.24	
Negeri NUWELETETU	428.893.512	751	0,002	0,04%	573	0,01	0,23%	0,083004	0,0000	0,00%	45.624681	0,0057	0,17%	8	0,005	0,05%	0,004973712	99.193.472	528.086.88	
KECAMATAN TEON NILA SERUA																				
Negeri USLIAPAN	428.893.512	655	0,002	0,04%	119	0,00	0,05%	2.785055	0,0004	0,00%	46.423311	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003106242	61.949.478	490.842.99	
Negeri KURALELE	428.893.512	382	0,001	0,02%	70	0,00	0,03%	2.599384	0,0003	0,00%	38.120586	0,047	0,14%	7	0,005	0,05%	0,002388555	48.639.429	477.532.94	
Negeri KOKROMAIN	428.893.512	351	0,001	0,02%	52	0,00	0,02%	1856.703	0,0002	0,00%	49.701372	0,0062	0,19%	7	0,005	0,05%	0,002771481	55.273.170	484.166.68	
Negeri MESSA	428.893.512	626	0,002	0,04%	315	0,00	0,13%	2.970725	0,0004	0,00%	46.868559	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003888537	77.551.229	506.444.74	
Negeri AMETH	428.893.512	547	0,002	0,03%	160	0,00	0,06%	1.633899	0,0002	0,00%	51.465331	0,0064	0,19%	7	0,005	0,05%	0,00379323	67.395.686	496.289.19	
Negeri WA R U 4 2 8 3	93.512	1.078	0,003	0,06%	322	0,00	0,13%	2.877890	0,0004	0,00%	35.99714	0,0045	0,13%	6	0,005	0,05%	0,003774784	75.282.590	504.176.10	
Negeri BUMEY	428.893.512	608	0,002	0,04%	218	0,00	0,09%	1.856703	0,0002	0,00%	46.461443	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003452189	69.048.323	497.941.84	
Negeri SIFLURU	428.893.512	471	0,001	0,03%	236	0,00	0,09%	1856703	0,0002	0,00%	52.970679	0,0066	0,20%	7	0,005	0,05%	0,003696360	73.718.539	502.617.05	
Negeri LAYENI	428.893.512	2.769	0,008	0,16%	634	0,0	0,25%	4.084747	0,0005	0,01%	33.968807	0,0042	0,13%	7	0,005	0,05%	0,005948565	118.635.495	547.529.00	
Negeri WOTAY	428.893.512	622	0,002	0,04%	350	0,00	0,14%	2.153775	0,0003	0,00%	52.411313	0,0065	0,20%	7	0,005	0,05%	0,004221746	84.196.598	513.090.11	
Negeri ISSU	428.893.512	827	0,002	0,05%	351	0,00	0,14%	2.413714	0,0003	0,00%	39.119658	0,0049	0,15%	7	0,005	0,05%	0,013853408	76.851.620	505.744.13	
Negeri LESLURU	428.893.512	514	0,002	0,03%	86	0,00	0,03%	2.228044	0,0003	0,00%	40.562569	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,02666275	53.174.981	482.068.49	
Negeri WATLUDAN	428.893.512	849	0,002	0,05%	424	0,01	0,17%	3.434901	0,0004	0,00%	34.089044	0,0042	0,13%	7	0,005	0,05%	0,003952465	79.424.490	508.318.00	
Negeri TRANA	428.893.512	523	0,002	0,03%	193	0,00	0,08%	2.042373	0,0003	0,00%	39.856239	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003068765	61.202.072	490.095.58	
Negeri JERILI	428.893.512	1.041	0,003	0,06%	424	0,01	0,17%	2.785055	0,0004	0,00%	30.585690	0,0038	0,11%	7	0,005	0,05%	0,003955942	78.895.529	507.789.04	
Negeri NAKUPIA	428.893.512	539	0,002	0,03%	228	0,00	0,09%	3.156395	0,0004	0,00%	35.152388	0,0044	0,13%	7	0,005	0,05%	0,003056419	60.955.846	489.849.35	
KECAMATAN SERAM UTARA																				
Negeri WAHA	428.893.512	7.207	0,021	0,42%	995	0,01	0,40%	20.126662	0,0026	0,03%	25.887119	0,0033	0,10%	9	0,006	0,06%	0,010069625	200.824.053	629.717.56	
Negeri AIR BESAR	428.893.512	919	0,003	0,05%	327	0,00	0,13%	105.832081	0,0137	0,14%	57.610218	0,0072	0,21%	7	0,005	0,05%	0,005842147	116.513.147	545.406.65	
Negeri PASAHARI	428.893.512	1.162	0,003	0,07%	374	0,00	0,15%	114.402190	0,0144	0,14%	43.141320	0,0054	0,16%	6	0,005	0,05%	0,005704127	113.760.527	542.654.03	
Negeri MANUJSELA	428.893.512	909	0,003	0,05%	464	0,01	0,18%	374.210107	0,0485	0,49%	63.495332	0,0079	0,24%	8	0,005	0,05%	0,010148335	202.393.816	631.287.328	
Negeri KALOA	428.893.512	478	0,001	0,03%	220	0,00	0,09%	183.238036	0,0237	0,24%	80.922831	0,0101	0,30%	8	0,005	0,05%	0,007059192	141.583.072	570.476.58	
Negeri KANIKEH	428.893.512	263	0,001	0,01%	99	0,00	0,04%	9.283516	0,0012	0,01%	76.989220	0,0096	0,29%	7	0,005	0,05%	0,003997492	79.724.180	508.617.69	
Negeri ROHO	428.893.512	380	0,001	0,01%	252	0,00	0,02%	147.235029	0,0191	0,19%	55.879633	0,0069	0,21%	7	0,005	0,05%	0,004881574	97.355.914	526.249.426	
Negeri HUAULIJ	428.893.512	343	0,001	0,02%	263	0,00	0,10%	185.670317	0,0241	0,24%	51.923534	0,0065	0,19%	7	0,005	0,05%	0,006252199	124.691.036	553.584.548	
Negeri RUMAH SOKAT	428.893.512	650	0,002	0,04%	263	0,00	0,25%	298.355363	0,0387	0,39%	34.598548	0,0043	0,13%	8	0,005	0,05%	0,011145024	222.271.328	65	

No	Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Pe Negeri			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Jumlah Perangkat Negeri						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
3	Negeri MARAINA	428.893.512	303	0,001	0,02%	252	0,00	0,10%	120.593.852	0,0156	0,16%	88.238.314	0,0110	0,33%	7	0,005	0,05%	0,006516365	129.959.448	558.852.95	
4	Negeri SOLEA	428.893.512	268	0,001	0,02%	137	0,00	0,05%	118.132.753	0,0153	0,15%	68.624.421	0,0085	0,26%	7	0,005	0,05%	0,005274299	105.188.237	534.081.74	
5	Negeri ELEMATA	428.893.512	263	0,001	0,02%	91	0,00	0,00%	9.280.000	0,0012	0,01%	45.239.08	0,0056	0,17%	7	0,005	0,05%	0,02478402	49.428.136	473.321.64	
6	Negeri HATUOLO	428.893.512	263	0,001	0,02%	9	0,00	0,00%	9.280.000	0,0012	0,01%	70.242.226	0,0087	0,26%	7	0,005	0,05%	0,03411302	68.033.461	496.926.97	
7	Negeri SIASTELE	428.893.512	328	0,001	0,02%	167	0,00	0,07%	175.968.580	0,0229	0,23%	62.546.064	0,0078	0,23%	7	0,005	0,05%	0,005951749	118.698.994	547.592.50	
8	Negeri MASIHULAN	428.893.512	263	0,001	0,02%	9	0,00	0,00%	9.280.000	0,0012	0,01%	57.172.452	0,0071	0,21%	7	0,005	0,05%	0,002923651	58.307.968	487.201.47	
9	Negeri OPING	428.893.512	263	0,001	0,02%	9	0,00	0,00%	9.280.000	0,0012	0,01%	42.248.668	0,0053	0,16%	7	0,005	0,05%	0,002366826	47.202.909	476.096.42	
0	Negeri OLONG	428.893.512	263	0,001	0,02%	9	0,00	0,00%	9.280.000	0,0012	0,01%	62.032.076	0,0077	0,23%	7	0,005	0,05%	0,003104969	61.924.102	490.817.61	
V	KECAMATAN BANDA																				
1	Negeri NUSANTARA	428.893.512	1.575	0,005	0,09%	153	0,00	0,06%	24.694.152	0,0032	0,03%	18.344.341	0,0023	0,07%	8	0,005	0,05%	0,003086100	61.547.789	490.441.30	
2	Negeri DWIWARNA	428.893.512	638	0,002	0,04%	61	0,00	0,02%	2.59.93.84	0,0003	0,00%	43.431.423	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,002751332	54.871.324	483.764.83	
3	Negeri MERDEKA	428.893.512	7.52	0,002	0,04%	62	0,00	0,02%	6.387.059	0,0008	0,01%	55.459.243	0,0069	0,21%	8	0,005	0,05%	0,033.88.630	67.581.309	496.474.82	
4	Negeri RAJAWALI	428.893.512	826	0,002	0,05%	92	0,00	0,04%	5.477.274	0,0007	0,01%	54.975.739	0,0068	0,21%	8	0,005	0,05%	0,03526.333	70.233.860	499.127.37	
5	Negeri KAMPUNG BARU	428.893.512	2.367	0,007	0,14%	120	0,00	0,05%	10.58.32.08	0,0014	0,01%	39.6.53.364	0,0049	0,1	5% 6	7	0,005	0,05%	0,003962844	7.9.0.33.117	507.926.68
6	Negeri PUI LAU HATTA	428.893.512	595	0,002	0,03%	57	0,00	0,02%	29.844.46	0,0033	0,04%	52.284.247	0,0065	0,19%	8	0,005	0,05%	0,03455679	68.918.499	497.812.01	
7	Negeri SEI AMON	428.893.512	2.106	0,006	0,12%	227	0,00	0,09%	100.481.16	0,0131	0,13%	38.002.18	0,0048	0,14%	8	0,005	0,05%	0,05426201	108.217.704	537.111.21	
8	Negeri LONTHOIR	428.893.512	1.801	0,005	0,11%	188	0,00	0,07%	39.166.827	0,0051	0,05%	62.740.202	0,0078	0,23%	7	0,005	0,05%	0,05133452	102.379.254	531.272.78	
9	Negeri PULAU AY	428.893.512	1.917	0,006	0,11%	384	0,01	0,15%	28.203.321	0,0037	0,04%	49.385.308	0,0061	0,18%	7	0,005	0,05%	0,005341389	106.526.252	535.097.96	
0	Negeri PULAU RHUN	428.893.512	1.870	0,004	0,08%	171	0,00	0,07%	24.43.4214	0,0032	0,03%	49.555.409	0,0062	0,18%	7	0,005	0,05%	0,004130087	82.368.587	511.262.09	
1	Negeri TANAH RATA	428.893.512	863	0,003	0,05%	163	0,00	0,06%	4.084.74	0,0005	0,01%	34.06.96.39	0,0042	0,13%	7	0,005	0,05%	0,029.59321	59.019.369	487.912.88	
2	Negeri WAER	428.893.512	1.211	0,004	0,07%	110	0,00	0,04%	14.835.058	0,0019	0,02%	60.508.785	0,0075	0,23%	8	0,005	0,05%	0,04146839	82.702.688	511.596.20	
3	Negeri BOIYAUW	428.893.512	916	0,003	0,05%	95	0,00	0,04%	17.426.435	0,0023	0,02%	55.645.583	0,0069	0,21%	7	0,005	0,05%	0,03697644	73.744.151	502.637.66	
4	Negeri DENDER	428.893.512	534	0,002	0,03%	57	0,00	0,02%	11.824.080	0,0015	0,02%	60.955.621	0,0076	0,23%	7	0,005	0,05%	0,03447820	68.761.769	497.655.28	
5	Negeri LA ITANG	428.893.512	447	0,001	0,03%	44	0,00	0,02%	11.45.513.9	0,0015	0,01%	6.4.41.0709	0,008C	0,24%	7	0,005	0,05%	0,03469170	69.187.557	498.08.10.6	
6	Negeri URING TUTRA	428.893.512	374	0,001	0,02%	37	0,00	0,01%	18.279.478	0,0024	0,02%	44.76.8505	0,0056	0,17%	8	0,005	0,05%	0,02822649	56.293.641	485.187.15	
7	Negeri WAILING SPANCBY	428.893.512	1.239	0,004	0,07%	129	0,00	0,05%	34.121.691	0,0044	0,04%	39.724.806	0,0049	0,15%	8	0,005	0,05%	0,03713403	74.058.430	502.951.94	
8	Negeri COMBIR KASESTOREN	428.893.512	631	0,002	0,04%	67	0,00	0,03%	31.29.9035	0,0041	0,04%	58.4973.09	0,0073	0,22%	8	0,005	0,05%	0,03773806	75.26.3086	504.156.59	
V	KECAMATAN TEHORU																				
9	Negeri TELUTHIBARU	428.893.512	1.317	0,004	0,08%	457	0,01	0,18%	31.19.16.27	0,0041	0,04%	4.3.8.39.32.0	0,005	5.1%	0,16%	8	0,005	0,05%	0,00518.9876	103.5.0.63.5	532.398.04
0	Negeri MOSSO	428.893.512	837	0,002	0,05%	397	0,01	0,16%	3990.0551	0,0052	0,05%	44.59.655	0,0055	0,17%	7	0,005	0,05%	0,047.32.73	94.3.87.595	523.281.10	
1	Negeri HATUMETE	428.893.512	868	0,003	0,05%	391	0,01	0,16%	28.741.765	0,0037	0,04%	45.841.463	0,0057	0,17%	7	0,005	0,05%	0,046.28.73	92.3.13.448	521.206.96	
2	Negeri HA TU	428.893.512	1.021	0,003	0,06%	625	0,01	0,25%	23.932.904	0,0031	0,03%	37.181.391	0,0046	0,14%	7	0,005	0,05%	0,005264596	104.994.734	533.888.24	
3	Negeri PIL IANA	428.893.512	644	0,002	0,04%	340	0,00	0,14%	41.497.316	0,0054	0,05%	54.224.865	0,0067	0,20%	7	0,005	0,05%	0,004772442	95.179.424	524.072.93	
4	Negeri YA PUTIH	428.893.512	1.789	0,005	0,10%	1.016	0,01	0,40%	38.303.786	0,0050	0,05%	38.613.556	0,0048	0,14%	8	0,005	0,05%	0,007579930	151.170.699	580.064.21	
5	Negeri SAUNULU	428.893.512	1.218	0,004	0,07%	593	0,01	0,24%	38.303.786	0,0050	0,05%	41.390.898	0,0051	0,15%	8	0,005	0,05%	0,005664662	112.973.452	541.866.96	
6	Negeri TEHORU	428.893.512	5.569	0,016	0,33%	1.269	0,02	0,51%	55.701.095	0,0072	0,07%	29.299.124	0,0036	0,11%	12	0,003	0,08%	0,010956533	218.512.150	647.405.66	
7	Negeri HAYA	428.893.512	5.862	0,017	0,34%	1.742	0,02	0,69%	23.249.637	0,0030	0,03%	33.229.629	0,0041	0,12%	12	0,003	0,08%	0,012737469	254.030.319	682.923.89	
8	Negeri SALAMAHU	428.893.512	342	0,001	0,02%	99	0,00	0,04%	15.967.647	0,0021	0,02%	42.279.019	0,0053	0,16%	7	0,005	0,05%	0,002859268	57.023.9591	485.971.47	
V	KECAMATAN SAPARUA																				
9	Negeri BOOI	428.893.512	783	0,002	0,05%	48	0,00	0,02%	15.224.966	0,0020	0,02%	40.232.484	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,002828911	56.418.525	485.312.03	
10	Negeri PAPERU	428.893.512	1.196	0,004	0,07%	71	0,00	0,03%	16.895.999	0,0022	0,02%	31.									

b	Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Alokasi Dana Negeri / Negeri	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Jumlah Perangkat Negeri			Total Bobot	Alokasi Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*EF	21=3+17	
2	Negeri KABA UW	428.893.512	2.151	0,006	0,13%	770	0,01	0,31%	22.280438	0,0029	0,03%	43.627367	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,006723720	134.094.836	562.988
3	Negeri KAILO LO	428.893.512	4.963	0,015	0,29%	1.274	0,02	0,51%	24.137141	0,0031	0,03%	35.073012	0,0044	0,13%	8	0,005	0,05%	0,010152976	202.486.402	631.379
4	Negeri PEAL JW	428.893.512	8.328	0,024	0,49%	1.772	0,02	0,71%	64.9.84611	0,0084	0,08%	30.831329	0,0038	0,12%	11	0,008	0,08%	0,014686151	292.893.965	721.787
5	Negeri KARIU	428.893.512	1.017	0,003	0,06%	310	0,00	0,12%	14.853625	0,0019	0,02%	49.2.91967	0,0061	0,18%	7	0,005	0,05%	0,004342402	86.602.909	515.496
6	Negeri HULALU	428.893.512	1.420	0,004	0,08%	175	0,00	0,07%	22.280438	0,0029	0,03%	39.305265	0,0049	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003764978	75.087.014	503.980
III KECAMATAN SALAHUTU																				
7	Negeri LIANG	428.893.512	7.481	0,022	0,44%	1.624	0,02	0,65%	85.408346	0,0111	0,11%	29.815270	0,0037	0,11%	10	0,007	0,07%	0,013758380	274.390.910	703.284
8	Negeri WAAI	428.893.512	6.633	0,019	0,39%	987	0,01	0,39%	89.678763	0,0116	0,12%	23.691261	0,0029	0,09%	12	0,008	0,08%	0,010689100	213.178.591	642.072
9	Negeri TULEHU	428.893.512	17.277	0,051	1,01%	2.156	0,03	0,86%	57.223592	0,0074	0,07%	18.692662	0,0023	0,07%	22	0,015	0,15%	0,021664713	432.071.250	860.964
10	Negeri TIAL	428.893.512	2.581	0,008	0,15%	318	0,00	0,13%	44.560876	0,0058	0,06%	24.507301	0,0030	0,09%	11	0,008	0,08%	0,005026229	100.240.848	529.134
11	Negeri TENGAH TENGAH	428.893.512	2.259	0,007	0,13%	289	0,00	0,12%	31.563954	0,0041	0,04%	39.671540	0,0049	0,15%	8	0,005	0,05%	0,004913496	97.992.537	526.886
12	Negeri SULL	428.893.512	10.545	0,031	0,62%	498	0,01	0,20%	120.685706	0,0156	0,16%	23.046762	0,0029	0,09%	13	0,009	0,09%	0,011483307	229.017.898	657.911
X KECAMATAN LEIHITU																				
13	Negeri ASILULU	428.893.512	5.499	0,016	0,32%	1.064	0,01	0,42%	3.527736	0,0005	0,00%	31.605502	0,0039	0,12%	11	0,008	0,08%	0,09440602	188.279.099	617.172
14	Negeri URENG	428.893.512	3.338	0,010	0,20%	613	0,01	0,24%	2.692220	0,0003	0,00%	32.211495	0,0040	0,12%	10	0,007	0,07%	0,006320845	126.060.082	554.953
15	Negeri NEGERI LIMA	428.893.512	5.290	0,016	0,31%	505	0,01	0,20%	2.729.334	0,0004	0,00%	47.768551	0,0059	0,18%	9	0,006	0,06%	0,007548897	150.551.785	579.445
16	Negeri SEITH	428.893.512	5.270	0,015	0,31%	1.234	0,02	0,49%	35.277360	0,0046	0,05%	28.958357	0,0036	0,11%	10	0,007	0,07%	0,010227220	203.967.056	632.860
17	Negeri KA TETU	428.893.512	3.659	0,011	0,21%	727	0,01	0,29%	2.599384	0,0003	0,00%	44.235470	0,0055	0,17%	9	0,006	0,06%	0,007341801	146.421558	575.315
18	Negeri HILA	428.893.512	4.636	0,014	0,27%	827	0,01	0,33%	14.112801	0,0018	0,02%	28.339993	0,0035	0,11%	10	0,007	0,07%	0,007937682	158.305.554	587.199
19	Negeri WAKAL	428.893.512	2.834	0,008	0,17%	1155	0,02	0,46%	2.735055	0,0004	0,00%	30.5.34867	0,0038	0,11%	12	0,008	0,08%	0,008258782	164.709.426	593.602
20	Negeri HITULAMA	428.893.512	4.061	0,012	0,24%	318	0,00	0,13%	33.420657	0,0043	0,04%	21.078206	0,0026	0,08%	10	0,007	0,07%	0,005553377	110.754.043	539.647
21	Negeri HITUMESSING	428.893.512	6.947	0,020	0,41%	1.396	0,02	0,58%	44.560876	0,0058	0,06%	31.709657	0,0039	0,12%	15	0,010	0,10%	0,012421680	247.732.376	676.625
22	Negeri MAMALA	428.893.512	2.386	0,007	0,14%	300	0,00	0,12%	26.92.2196	0,0035	0,08%	31.6.70718	0,0039	0,12%	8	0,005	0,05%	0,004673094	93.198.075	522.091
23	Negeri MORELLA	428.893.512	2.778	0,008	0,16%	377	0,01	0,15%	22.280438	0,0029	0,03%	34.087057	0,0042	0,13%	7	0,005	0,05%	0,005170963	103.127.344	532.020
II KECAMATAN NUSALAUT																				
24	Negeri AMETH	428.893.512	1.377	0,004	0,08%	316	0,00	0,13%	10.6.76.043	0,0014	0,01%	39.242506	0,0049	0,15%	7	0,005	0,05%	0,004148336	82.732.549	511.626
25	Negeri TITAWAI	428.893.512	1.474	0,004	0,09%	317	0,00	0,13%	11.140219	0,0014	0,01%	38.300054	0,0048	0,14%	7	0,005	0,05%	0,004180063	83.365.296	512.258
26	Negeri ABUBU	428.893.512	589	0,002	0,03%	140	0,00	0,06%	7.890988	0,0010	0,01%	38.349347	0,0048	0,14%	7	0,005	0,05%	0,002916062	58.156.616	487.050
27	Negeri AKOON	428.893.512	664	0,002	0,04%	194	0,00	0,08%	8.819340	0,0011	0,01%	41.422320	0,0052	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003301717	65.847.955	494.741
28	Negeri NALAHIA	428.893.512	400	0,001	0,02%	60	0,00	0,02%	9.747692	0,0013	0,01%	38.170691	0,0047	0,14%	7	0,005	0,05%	0,002504122	49.941.079	478.834
29	Negeri SILA	428.893.512	296	0,001	0,02%	134	0,00	0,03%	5.570110	0,0007	0,01%	43.377951	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,00259190	51.837.070	480.730
30	Negeri L EINIT U	428.893.512	286	0,001	0,02%	53	0,00	0,02%	6.498461	0,0008	0,01%	59.472871	0,0074	0,22%	7	0,005	0,05%	0,003162087	63.063.228	491.956
I KECAMATAN SERAM UTARA BAR																				
31	Negeri SALEMAN	428.893.512	1.431	0,004	0,08%	166	0,00	0,07%	40.364721	0,0052	0,05%	33.384859	0,0042	0,12%	7	0,005	0,05%	0,003374309	74.770.248	503.663
32	Negeri HORALE	428.893.512	1.974	0,006	0,12%	758	0,01	0,30%	27.926672	0,0036	0,04%	30.101364	0,0037	0,11%	7	0,005	0,05%	0,006140641	122.466.171	551.359
33	Negeri WAILULU	428.893.512	1.431	0,004	0,08%	385	0,01	0,15%	21.853396	0,0028	0,03%	33.384859	0,0042	0,12%	7	0,005	0,05%	0,004381017	87.373.020	516.266
34	Negeri PAA	428.893.512	313	0,001	0,02%	183	0,00	0,07%	1.6.517493	0,0024	0,02%	41.444170	0,0052	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003028281	61.471.637	490.365
35	Negeri KAR LUTU KARA	428.893.512	406	0,001	0,02%	198	0,00	0,08%	21.853396	0,0026	0,03%	57.426148	0,0071	0,21%	7	0,005	0,05%	0,003932374	78.42.549.8	507.319
36	Negeri PASANEA	428.893.512	982	0,003	0,06%	435	0,01	0,17%	8.540835	0,0011	0,01%	42.209815	0,0052	0,16%	7	0,005	0,05%	0,004473440	89.216.272	518.109
37	Negeri LABUAN	428.893.512	950	0,003	0,06%	148	0,00	0,06%	118.736168	0,0154	0,15%	49.893192	0,0062	0,19%	7	0,005	0,05%	0,005027042	100.257.049	529.150
38	Negeri GALE-GALE	428.893.512	1.765	0,005	0,10%	238	0,00	0,09%	113.9.83008	0,0148	0,15%	41.623282	0,0052	0,16%	7	0,005	0,05%	0,005493160	1	

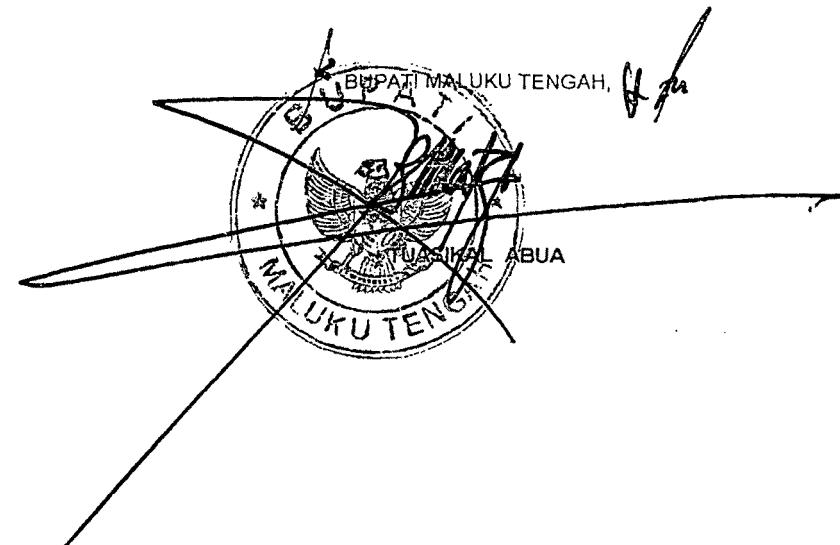
No	Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Jumlah Perangkat Negeri			Total Bobot	Alokasi Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17
XIII	KECAMATAN LEIHITU BARAT																			
138	Negeri LARIKE	428.893.512	4.018	0,012	0,24%	715	0,01	0,28%	34.460.411	0,0045	0,04%	30.753.501	0,0038	0,11%	10	0,007	0,07%	0,007483107	149.239.696	578.133.208
139	Negeri WAKASIHU	428.893.512	3.318	0,010	0,19%	220	0,00	0,09%	25.863.875	0,0034	0,03%	36.469.106	0,0045	0,14%	9	0,006	0,06%	0,005135162	102.413.354	531.306.866
140	Negeri ALLANG	428.893.512	4.567	0,013	0,27%	689	0,01	0,27%	37.913.879	0,0049	0,05%	33.730.943	0,0042	0,13%	7	0,005	0,05%	0,007651697	152.601.992	581.495.503
141	Negeri LI LIB OY	428.893.512	1.777	0,005	0,10%	365	0,00	0,15%	27.572.042	0,0036	0,04%	30.957.834	0,0039	0,12%	7	0,005	0,05%	0,004487901	89.504.661	518.398.180
142	Negeri HATU	428.893.512	4.204	0,012	0,25%	830	0,01	0,33%	31.025.510	0,0040	0,04%	30.758.281	0,0038	0,11%	9	0,006	0,06%	0,007937093	158.293.806	587.187.318
XIV	KECAMATAN TELUTIH																			
143	Negeri UL A H AH A N	428.893.512	928	0,003	0,05%	62	0,00	-0,02%	21.240.684	0,0028	0,03%	78.021.726	0,0097	0,29%	7	0,005	0,05%	0,004457626	88.900.886	517.943.398
144	Negeri LAHA KABA	428.893.512	1.426	0,004	0,08%	179	0,00	0,07%	7.965.257	0,0010	0,01%	69.974.772	0,0087	0,26%	8	0,005	0,05%	0,004811783	95.964.034	524.857.546
145	Negeri LAFA	428.893.512	1.571	0,005	0,09%	340	0,00	0,14%	24.786.987	0,0032	0,03%	43.684.738	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,004706308	93.860.478	522.753.990
146	Negeri YAMALATU	428.893.512	522	0,002	0,03%	107	0,00	0,04%	13.628.201	0,0018	0,02%	53.213.466	0,0066	0,20%	7	0,005	0,05%	0,003374348	67.296.482	496.189.994
147	Negeri HUNISI	428.893.512	354	0,001	0,02%	65	0,00	0,03%	26.550.855	0,0034	0,03%	46.293.054	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003017890	60.187.435	489.080.947
148	Negeri LAIMU	428.893.512	4.721	0,014	0,28%	533	0,01	0,21%	35.945.773	0,0047	0,05%	47.832.706	0,0059	0,18%	8	0,005	0,05%	0,007690212	153.370.106	582.263.618
149	Negeri MANEORATU	428.893.512	266	0,001	0,02%	79	0,00	0,03%	36.577.052	0,0047	0,05%	66.147.857	0,0082	0,25%	7	0,005	0,05%	0,003892768	77.635.599	506.529.111
150	Negeri TEHUA	428.893.512	2.615	0,008	0,15%	369	0,00	0,15%	19.922.425	0,0026	0,03%	56.705.334	0,0071	0,21%	8	0,005	0,05%	0,005925450	118.174.491	547.068.003
151	Negeri LAHA	428.893.512	377	0,001	0,02%	118	0,00	0,05%	22.131.902	0,0029	0,03%	69.690.244	0,0087	0,26%	7	0,005	0,05%	0,004058079	80.932.496	509.826.008
152	Negeri WOLU	428.893.512	1.436	0,004	0,08%	859	0,01	0,34%	30.988.376	0,0040	0,04%	59.255.987	0,0074	0,22%	8	0,005	0,05%	0,007423237	148.045.694	576.939.205
XV	KECAMATAN SERUT TIMUR SETI																			
153	Negeri SETI	428.893.512	1.759	0,005	0,10%	561	0,01	0,22%	622.924.305	0,0807	0,81%	42.5.163.141	0,0053	0,16%	12	0,008	0,08%	0,013748262	274.189.122	703.082.634
154	Negeri KOI BISCUINTA	428.893.512	1.525	0,004	0,09%	143	0,00	0,06%	45.761.803	0,0059	0,06%	37.593.236	0,0047	0,14%	7	0,005	0,05%	0,003935636	75.703.27	507.463.839
155	Negeri WA ILO PING	428.893.512	1.282	0,004	0,08%	85	0,00	0,03%	2.233.752	0,0003	0,00%	41.410.641	0,0052	0,15%	7	0,005	0,05%	0,0031441467	62.7.11.838	491.605.350
156	Negeri TIJUANA	428.893.512	815	0,002	0,05%	208	0,00	0,08%	9.190.681	0,0012	0,01%	59.273.654	0,0074	0,22%	7	0,005	0,05%	0,004168886	82.105.322	510.996.834
157	Negeri WAITILA	428.893.512	831	0,002	0,05%	95	0,00	0,04%	16.246.153	0,0021	0,02%	52.584.322	0,0065	0,20%	7	0,005	0,05%	0,003518272	70.166.826	499.060.338
158	Negeri WAIPUTIH	428.893.512	979	0,003	0,06%	121	0,00	0,09%	44.56.0876	0,0058	0,06%	40.489.513	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003624305	72.281.495	501.173.007
159	Negeri WAIMUSAL	428.893.512	481	0,001	0,03%	130	0,00	0,05%	12.254.241	0,0016	0,02%	60.495.326	0,0075	0,23%	7	0,005	0,05%	0,003695752	73.706.405	502.599.917
160	Negeri TANAH MERAH	428.893.512	1.160	0,003	0,07%	415	0,01	0,17%	21.983.366	0,0028	0,03%	42.061.989	0,0052	0,16%	7	0,005	0,05%	0,004666937	93.075.281	521.968.93
161	Negeri AKETEF RANTE	428.893.512	442	0,001	0,03%	292	0,00	0,12%	13.423.964	0,0017	0,02%	46.033.562	0,0057	0,17%	8	0,005	0,05%	0,003861969	7.7.021.38	505.914.880
162	Negeri NAMTO	428.893.512	309	0,001	0,02%	67	0,00	0,03%	12.477.045	0,0016	0,02%	43.051.391	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,002696095	5.3.769.707	482.662.19
163	Negeri LOPING MULYO	428.893.512	764	0,002	0,04%	51	0,00	0,02%	20.975.038	0,0027	0,03%	58.359.176	0,0073	0,22%	7	0,005	0,05%	0,003580557	71.409.203	500.302.714
164	Negeri WO NOSARI	428.893.512	1.240	0,004	0,07%	117	0,00	0,05%	12.260.171	0,0016	0,02%	35.993.369	0,0045	0,13%	7	0,005	0,05%	0,003175055	63.321.869	492.215.381
XVI	KECAMATAN SERUT TIMUR KOB																			
165	Negeri KOB	428.893.512	1.071	0,003	0,06%	316	0,00	0,13%	20.052.398	0,0026	0,03%	43.656.078	0,0054	0,16%	8	0,005	0,05%	0,004323648	86.228.891	515.122.403
166	Negeri SARIPUTIH	428.893.512	2.002	0,006	0,12%	542	0,01	0,22%	7.917.066	0,0010	0,01%	46.779.228	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,005650082	112.882.110	541.775.622
167	Negeri MANEO RENDAH	428.893.512	1.012	0,003	0,06%	748	0,01	0,30%	139.252.738	0,0180	0,18%	81.642.614	0,0102	0,30%	10	0,007	0,07%	0,009108326	181.652.335	610.545.847
168	Negeri KOBIMUKTI	428.893.512	1.239	0,004	0,07%	24	0,00	0,01%	2.228.044	0,0003	0,00%	39.820.246	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,002816989	56.180.754	485.074.266
169	Negeri LEAWAY	428.893.512	795	0,002	0,05%	77	0,00	0,03%	16.710.329	0,0022	0,02%	4.343.293	0,0055	0,17%	8	0,005	0,05%	0,003192618	63.672.138	492.565.650
170	Negeri SAMAL	428.893.512	1.014	0,003	0,06%	495	0,01	0,20%	3.4.8.1.3184	0,0045	0,05%	40.224.106	0,0050	0,15%	7	0,005	0,05%	0,004997502	99.667.929	528.561.441
171	Negeri MOROKAI	428.893.512	1.237	0,004	0,07%	101	0,00	0,04%	20.423.735	0,0026	0,03%	39.150.287	0,0049	0,15%	7	0,005	0,05%	0,003333196	66.475.763	495.369.275
172	Negeri WAIMUSI	428.893.512	1.123	0,003	0,07%	213	0,00	0,08%	20.145.225	0,0026	0,03%	45.256.800	0,0056	0,17%	7	0,005	0,05%	0,003936441	78.506.601	507.400.113
173	Negeri WAYASIH	428.893.512	658	0,002	0,04%	28	0,00	0,01%	8.262.329	0,0011	0,01%	46.786.952	0,0058	0,17%	7	0,005	0,05%	0,002830285	56.445.935	485.339.447
174	Negeri WAITONIPA	428.893.512	782	0,002	0,05%	114	0,00	0,05%	2.738.372	0,0035	0,04%	43.813.015	0,0054	0,16%	7	0,005	0,05%	0,003374831	67.306.108	496.199.620
175	Negeri MARASAHUA	428.893.512	369	0,001	0,02%	66	0,00	0,03%	2.159.3458	0,0028										

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Jumlah Perangkat Negeri			Total Bobot	Alokasi Formula		
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan-Geografis	Rasio Indeks Kesulitan-Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
1 Negeri MAHU		428.893.512	59	0,002	0,03%	193	0,00	0,08%	12,161406	0,0016	0,02%	37,328381	0,0046	0,14%	7	0,005	0,05%	0,003146073	62.743.855	491.637.367
2 Negeri TU HAH A	428.893.512	8.935.12	2.318	0,007	0,14%	73	0,01	0,29%	24,694152	0,0032	0,03%	40,890378	0,0051	0,15%	7	0,005	0,05%	0,006619460	132.015.528	560.909.046
3 Negeri I H AMAH U	428.893.512	8.935.12	1.387	0,04	0,08%	216	0,00	0,9%	22,456108	0,0029	0,03%	26,595576	0,0033	0,10%	7	0,005	0,05%	0,003437037	68.546.711	497.440.223
4 Negeri IHA	428.893.512	8.935.12	539	0,002	0,03%	44	0,00	0,02%	0,018567	0,0000	0,00%	27,850484	0,0035	0,10%	7	0,005	0,05%	0,002010793	40.102.353	468.995.865
5 Negeri NOLLOTH	428.893.512	2.847	0,008	0,16%	1097	0,01	0,44%	2075075	0,0027	0,03%	38,917292	0,0048	0,15%	7	0,005	0,05%	0,001812145	161.50591	59.086403	
6 Negeri ITAWAKA	428.893.512	1.867	0,005	0,11%	627	0,01	0,25%	1893372	0,0025	0,02%	37,436769	0,0047	0,14%	7	0,005	0,05%	0,001571359	113.98638	54.2.842156	
TOTAL		79.774.193.200	340.987	1,00	20,00%	75.357	-1,00	39,00%	7.715,38	1,0000	10,00%	8.040,48	1,0000	30,00%	1.458,00	1,0000	10,00%	100,00%	19.943.548.300	99.717.741.504

Kontrol Perhitungan	
Pagu Alokasi Dana Negeri Kabupaten Maluku Tengah (APBD)	99.717.741.500 (c)
Pagu Alokasi Dasar Per Negeri	428.893.512 (d)
Total Pagu Alokasi Dasar	79.774.193.200 (e)
Pagu Bagian Formula	19.943.548.300 (f)
Jumlah Desa/Negeri	186 (g)

Bobot	
JP	20% (h)
AK	30% (i)
LW	10% (j)
IKG	30% (k)
JPN	10% (l)

100%



MPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGUNAAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

TAHAP TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH NEGERI

KECAMATAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH

zu Desa/Negeri : Rp

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.1	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.1.1	Alokasi Dana Negeri					
1.1.1.1	– TAHAP PERTAMA					
1.1.1.2	– TAHAP KEDUA					
1.1.1.3	– TAHAP KETIGA					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
J U M L A H					Rp 0	

terangan :

SP2D Penyaluran Alokasi Dana Negeri dari Kabupaten ke Negeri

Disetujui oleh,
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

BENDAHARA NEGERI

(.....)

(.....)

